



KRITIK TERHADAP UPAYA JOKOWI MENGHAPUS OPOSISI DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI MENURUT PANDANGAN CAK NUR

Kristianto Ratu Marius Naben¹, Alfian Tanggang²

^{1,2}Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

Email: ¹cristianonaben@gmail.com, ²alfiantanggang28@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkritisi upaya Joko Widodo, sewaktu masih menjadi Presiden Republik Indonesia, menghapus oposisi dari Indonesia dari perspektif demokrasi menurut pandangan Cak Nur. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan data dari berbagai jurnal, buku, termasuk beberapa berita yang terkait dengan tema tulisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan Jokowi untuk menggemukkan koalisinya merupakan upaya menghilangkan oposisi di Indonesia. Kebijakan ini berpengaruh buruk bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan pandangan Cak Nur tentang pentingnya oposisi bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Cak Nur menilai bahwa oposisi berperan dalam menjaga kestabilan sebuah bangsa. Karena itu, oposisi tidak dapat ditiadakan dengan argumen apa pun. Pada masa pemerintahannya, Jokowi berusaha menghilangkan oposisi di Indonesia karena sebenarnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar berdemokrasi dan cenderung hendak memperkuat dominasinya dalam kursi kekuasaan. Koalisi gemuk ala Jokowi adalah keputusan yang membahayakan keberlanjutan demokrasi di negara ini, sebab fungsi-fungsi vital dari oposisi tidak dapat terlaksana.

Kata Kunci: Cak Nur, Demokrasi, Partai Oposisi, Koalisi Gemuk, Jokowi

ABSTRACT

This article aims to criticize Joko Widodo's efforts, when he was still President of the Republic of Indonesia, to eliminate the opposition from Indonesia from the perspective of democracy according to Cak Nur's view. This study uses a literature study, namely by collecting data from various journals, books, including several news items related to the theme of the article. The results of this study indicate that Jokowi's decision to fatten his coalition is an attempt to eliminate the opposition in Indonesia. This policy has a negative impact on the sustainability of democracy in Indonesia. This is reinforced by Cak Nur's view of the importance of the opposition for a democratic country like Indonesia. Cak Nur believes that the opposition plays a role in maintaining the stability of a nation. Therefore, the opposition cannot be eliminated with any argument. During his administration, Jokowi tried to eliminate the opposition in Indonesia because he actually did not understand the basic principles of democracy and tended to want to strengthen his dominance in the seat of power. Jokowi's fat coalition is a decision that endangers the sustainability of democracy in this country, because the vital functions of the opposition cannot be carried out.

Keywords: Cak Nur, Democracy, Opposition Party, Fat Coalition, Jokowi

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia politik dan demokrasi, partai yang menang dalam pemilihan umum biasanya akan memegang kendali pemerintahan. Partai lain bisa bergabung bersama partai pemenang untuk menjalankan roda pemerintahan.

Meskipun demikian, ada juga partai yang memilih dan memutuskan untuk berada di luar pemerintahan. Mereka menjadi oposisi. Keberadaan oposisi juga memainkan peran yang signifikan dalam dunia politik dan demokrasi. Oposisi hadir untuk memperkuat demokrasi sebagai kekuatan pengimbang yang mengontrol pemerintah. Oposisi ada untuk mengoreksi praktik kekuasaan yang dijalankan pemerintah [1]. Oposisi juga berperan dalam mengawal jalannya praktik demokrasi. Oposisi yang menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dapat meningkatkan kualitas demokrasi [2]. Di samping itu, oposisi juga berperan dalam menjaga stabilitas demokrasi yang kondusif agar sistem demokrasi dapat berjalan dengan baik [3]. Karena itu, orang tidak perlu mencemaskan atau takut akan keberadaan oposisi. Ia hadir sebagai kekuatan untuk menjaga pelaksanaan demokrasi yang sehat dan demokratis.

Dinamika kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia beberapa tahun terakhir patut dicermati. Pada periode kedua pemerintahannya, Joko Widodo memilih dan melantik Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, rivalnya dalam pemilihan presiden, menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia. Jokowi memilih Prabowo karena ia menilai bahwa Prabowo memiliki kompetensi dalam dunia pertahanan. Keputusan Jokowi ini tentu menuai beragam tanggapan, terutama dari para pengamat politik dan Hak Asasi Manusia (HAM). Greg Fealy, pengamat politik dari *Australian National University* ini menyatakan bahwa pengangkatan Prabowo menjadi Menhan sangat kontroversial karena rekam jejaknya yang buruk dalam berbagai persoalan pelanggaran HAM [4]. Selain Prabowo dan Gerindra, Partai Demokrat juga akhirnya memutuskan untuk bergabung ke dalam pelukan pemerintah. Tanggal 2 Februari 2024, Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) dilantik oleh Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Setelah lebih dari sembilan tahun Demokrat berperan sebagai oposisi, akhirnya mereka memutuskan untuk mendekat ke pangkuhan kekuasaan.

Gemuknya koalisi ala Jokowi ini telah merupakan sinyal buruk bagi demokrasi di Indonesia. Bergabungnya mayoritas partai di parlemen ke dalam lingkungan pemerintahan berarti hilangnya partai-partai oposisi di Indonesia. Bila oposisi tidak ada, maka tidak hanya prinsip *check and balance* (pengawasan dan keseimbangan) yang hilang, tetapi juga membuka keran bagi penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis. Dampak negatif lain yang dari situasi ini ialah suara rakyat tidak akan didengar dan semua keputusan berada di tangan elite politik yang sedang berkuasa.

Melalui tulisan ini, penulis hendak menganalisis praktik demokrasi di Indonesia bertolak dari pandangan Nurcholish Madjid atau yang akrab disapa Cak Nur tentang demokrasi dan oposisi. Demokrasi yang diidealkan Cak Nur adalah demokrasi yang dinamis dan menyatu pada masyarakat dalam bentuk proses-proses yang progresif. Demokrasi yang dinamis itu ditandai oleh adanya hak-hak asasi manusia, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, ketertiban dan keadilan hukum, perwujudan dan kesempatan yang merata [5]. Keberadaan oposisi dalam satu negara juga merupakan bagian dari proses demokrasi. Kritikan dari oposisi adalah bentuk pengawasan dan kekuatan penyeimbang kekuasaan. Upaya-upaya penghapusan keberadaan oposisi beserta perannya, menurut Cak Nur, adalah tindakan yang akan membunuh demokrasi itu sendiri [6].

Ada beberapa penelitian yang mengulas keberadaan partai politik oposisi serta koalisi yang dibangun pada masa pemerintahan Joko Widodo. Akbar et.al (2020) mengulas dampak multipartai pada periode pertama pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla yang mengakibatkan ketergantungan pada opini partai koalisi dalam pengambilan keputusan serta kebijakan pemerintahan. Akibat lanjutnya adalah posisi presiden Jokowi cukup lemah di hadapan partai koalisi yang gemuk sehingga kepemimpinannya cenderung akomodatif dan transaksional terhadap kepentingan koalisi [7]. Pendapat yang sama dikemukakan Efriza (2022) bahwa pada awal periode kedua kepemimpinan Jokowi, ada indikasi kemunduran demokrasi yang ditandai oleh gaya kepemimpinan yang akomodatif dan transaksional serta upaya memberangus peran oposisi serta peran *check and balance* dari parlemen yang tidak berjalan [8]. Sementara itu, Hakim, Darmawan dan Anggraeni (2019) membahas kebijakan Presiden Jokowi yang menggandeng mantan lawan politiknya untuk masuk ke dalam koalisinya. Situasi ini dibaca sebagai upaya Jokowi merasionalisasi tindakan mereduksi kekuatan oposisi di Indonesia [9]. Sedangkan Benny dan Maharani (2024) melihat fenomena pelemahan kelompok oposisi selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi berakibat pada kecenderungan untuk mengakomodasi kepentingan partai-partai dalam koalisi demi jalannya roda pemerintah dan mengabaikan suara atau kepentingan oposisi [10].

Fenomena pelemahan oposisi dan koalisi gemuk pada masa pemerintahan Jokowi juga merupakan topik penelitian ini. Hal yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penulis mengkritisi koalisi gemuk ala Jokowi dengan menggunakan perspektif Nurcholish Madjid tentang pentingnya oposisi dalam satu pemerintahan. Karena itu, masalah pokok yang mau dijawab dalam penelitian ini adalah apa bahaya dari koalisi gemuk ala Jokowi bagi demokrasi? Bagaimana peran oposisi dalam sebuah negara demokrasi menurut Cak Nur?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai jurnal, artikel ilmiah dan buku serta berita-berita terkait topik penelitian. Data-data tersebut diperoleh melalui *Google Scholar* dengan kata kunci seperti “koalisi gemuk, oposisi dalam sistem demokrasi, oposisi menurut pandangan Nurcholish Madjid”. Selain bersesuaian dengan topik penelitian, kriteria lain yang digunakan adalah artikel-artikel tersebut terbit dalam sepuluh tahun terakhir. Selanjutnya semua data yang sudah dikumpulkan ini kemudian diolah cara mengelompokkan data-data ke dalam tema-tema tertentu lalu dianalisis lebih lanjut. Pengolahan dan analisis ini bertujuan untuk memahami ide Nurcholish Madjid tentang oposisi dan menggunakannya untuk membedah praktik demokrasi pada masa pemerintahan Joko Widodo selama dua periode kepemimpinannya serta menegaskan bahwa oposisi tetap penting untuk pemerintahan yang sekarang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Cak Nur

Prof. Dr. Nurcholish Madjid atau yang akrab dipanggil Cak Nur merupakan seorang cendekiawan dan pemikir Islam yang moderat dan sangat nasionalis. Cak Nur lahir pada tanggal 17 Maret 1939 di Jombang, Jawa Timur. Sejak kecil, Cak Nur sudah diperkenalkan dengan budaya pesantren. Ini berkat peran

ayahnya, H. Abdul Madjid, seorang alim pesantren Tebu Ireng, yang mempunyai hubungan dekat dengan pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang sekaligus salah satu Ulama yang mendirikan Nahdlatul Ulama (NU), yakni KH Hasyim Asy'ari. Sedangkan, Ibunda Cak Nur, Fatonah, merupakan putri dari Kiai Abdullah Sadjad, seorang aktivis Sarekat Dagang Islam (SDI) di Kediri, Jawa Timur. Fatonah juga adalah murid KH Asy'ari. Berkat kultur pesantren dan NU yang diwariskan oleh kedua orang tuanya, Cak Nur kemudian tumbuh menjadi pribadi yang cemerlang.

Cak Nur menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah atas di beberapa pesantren, seperti di Pesantren Darul Ulum Rejoso di Jombang dan Pesantren Gontor di Ponorogo. Kemudian, Cak Nur melanjutkan studinya di bidang Sastra Arab di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama berkuliah, Cak Nur terlibat aktif dalam beragam ekstrakurikuler dan dalam berbagai diskusi-diskusi, baik di dalam maupun di luar kampusnya. Berkat keterlibatan aktifnya dalam berbagai kegiatan, Cak Nur kemudian dipercayakan menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Setamatnya ia dari IAIN, Cak Nur mendapat kesempatan untuk melanjutkan program doktoralnya di *University of Chicago*, Amerika Serikat, dan berhasil menamatkannya pada tahun 1984. Sekembalinya ke Indonesia, Cak Nur langsung berkutat dengan pengabdian kepada negara. Pengabdiannya tampak saat ia menjadi peneliti pada beberapa lembaga penelitian negara, misalnya Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dari tahun 1984 hingga 2005. Sedangkan, pada masa Orde Baru, Cak Nur pernah menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR RI) selama dua periode. Selain itu, ia pernah menjadi anggota sekaligus pakar pada Dewan Riset Nasional yang menggagas berdirinya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Berkat jasa-jasanya kepada negara, pada tahun 1998 Cak Nur dianugerahi Bintang Mahaputra dari Pemerintah Republik Indonesia [11].

Dalam perjalanan waktu, setelah bergelut dengan penyakit sirosis hati yang dideritanya, Cak Nur kemudian wafat pada tahun 2005 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Meskipun Cak Nur merupakan seorang warga sipil, namun berkat jasa-jasanya yang besar pada negara maka ia berhak dimakamkan di pemakaman khusus bagi para pahlawan Indonesia tersebut [12]. Cak Nur telah meninggal lebih dari dua dekade, namun buah-buah pemikirannya masih menggaung dan memacu orang lain untuk terus menelaahnya, salah satunya mengenai ide Cak Nur tentang pentingnya oposisi di Indonesia.

Oposisi dalam Pandangan Cak Nur

Pandangan Cak Nur seputar negara dan oposisi berangkat dari rasa keprihatinannya terhadap kehidupan politik di Indonesia pada masa Orde Baru [13]. Pada masa itu, para petinggi bangsa Indonesia menjadi sosok yang sangat anti kritik, sehingga roda pemerintahan berputar tanpa pengawas dan penyeimbang (baca: oposisi). Keprihatinan itu semakin memuncak ketika Cak Nur mengamati adanya kecenderungan para penguasa yang tertutup terhadap diskusi dan perdebatan politik, apalagi mesti merelakan diri mereka untuk dikritik oleh pihak lain. Oleh karena keprihatinan ini, Cak Nur kemudian melontarkan pemikiran-pemikiran kritisnya terhadap situasi yang ada, termasuk pemikirannya tentang pentingnya partai oposisi di Indonesia [14].

Gagasan Cak Nur mengenai pentingnya partai oposisi di Indonesia pertama kali ia lontarkan pada 7 Februari 1994 dalam sebuah seminar di LIPI Jakarta. Mengawali makalah yang ia bawakan pada seminar tersebut, Cak Nur mengungkapkan bahwa gejolak tuntutan untuk mewujudkan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia belakangan ini adalah hal yang wajar. Gejolak tersebut, menurut Cak Nur, adalah konsekuensi dari perkembangan bangsa Indonesia yang baru saja lahir [15]. Meskipun demikian, ide Cak Nur tentang partai oposisi mendapat penolakan dari berbagai pihak. Alasannya adalah oposisi masih dianggap sebagai ancaman dan dilihat melulu sebagai upaya untuk merobohkan pemerintahan. Namun, Cak Nur tetap pada pendiriannya bahwa oposisi diperlukan di Indonesia karena oposisi adalah wujud dari pengakuan adanya perbedaan pandangan. Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu khawatir bahwa partai oposisi akan menggulingkan pemerintahan [16]. Dalam situasi perkembangan bangsa Indonesia yang dinamis ini, Cak Nur yakin demokrasi akan memberi jaminan bagi terciptanya lingkungan politik yang lebih kondusif. Dengan mengatakan hal tersebut, Cak Nur sebenarnya berbicara tentang pentingnya fungsi *check and balance*.

Check and balance adalah fungsi utama dan pertama dari kelompok oposisi. Oposisi menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan [17]. Sedangkan, fungsi penyeimbang dapat berupa evaluasi dan kritik kepada kebijakan publik pemerintah, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas. Oposisi mengamalkan demokrasi sebagai sistem yang terbuka untuk semua peserta, sehingga tidak dapat membenarkan kebijakan publik yang dibangun atas dasar keinginan atau cita-cita seseorang, sekalipun orang tersebut dikenal sangat bijaksana [18]. Dengan mengawasi dan mengimbangi kekuasaan yang ada, sebuah bangsa dapat menjauhkan diri dari kemungkinan jatuh kepada sebuah tirani [19]. Perlu diingat bahwa partai oposisi yang Cak Nur maksudkan ialah oposisi yang loyal terhadap negara demi cita-cita kebaikan bersama, bukannya *oposisionalisme* yang bersifat subjektif dan intinya “asal berbeda pendapat” [20].

Hal yang menonjol bagi kelompok oposisi dalam menjalankan fungsi *check and balance* ini adalah sikap kritis terhadap pemerintahan dan kekuasaan. Sikap kritis ini ditunjukkan dengan keberanian untuk mengkritik dan mengoreksi pemerintahan sekaligus menunjukkan keberpihakan pada rakyat untuk memperjuangkan hak dan kebutuhan mereka [21]. Dengan mengambil posisi seperti ini, oposisi menampilkan diri sebagai perwakilan rakyat yang bersuara jika ada ketimpangan, ketidakadilan dan apa saja yang mencederai demokrasi. Oposisi menyuarakan kegelisahan rakyat ketika pemerintah yang berkuasa tidak lagi berpihak pada mereka. Lebih dari itu, oposisi harus menjadi suara dari kaum tak bersuara, kaum yang sama sekali tidak didengarkan suara mereka atau mereka yang terpinggirkan. Oposisi dan masyarakat kecil adalah kaum minoritas yang harus berhadapan dengan pemerintahan dengan partai-partai koalisinya sebagai kaum mayoritas. Meskipun demikian, oposisi tetap menyuarakan kebenaran dan berkomitmen dalam memperjuangkan kebenaran itu [22].

Cak Nur menambahkan, oposisi bertugas untuk menilai sekaligus mengevaluasi kebijakan publik. Cak Nur menganggap bahwa sebuah peraturan, apalagi kebijakan publik, mestinya lahir dari pertengkaran ide di dalam masyarakat berdasarkan tuntutan yang ada. Pendapat Cak Nur ini bukan tanpa alasan, mengingat bangsa Indonesia dari waktu ke waktu akan berkembang menjadi bangsa yang semakin kompleks, terutama dalam kehidupan sosio-

politiknya [23]. Dalam hubungan dengan ini, Cak Nur menyitir sebuah peribahasa Jawa yang berbunyi “*tega larane, tapi ora tega matine*” artinya “tega melihatnya sakit, tetapi tidak tega melihatnya mati”. Lewat peribahasa ini, Cak Nur hendak menyatakan bahwa meski partai oposisi setia mengkritik pemerintah, namun tidak sekalipun ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah [24].

Selanjutnya, Cak Nur juga memandang pentingnya oposisi adalah untuk menghadirkan alternatif kebijakan bagi pemerintah [25]. Kehadiran oposisi memungkinkan munculnya pilihan atau alternatif kebijakan untuk mencapai kebijakan yang paling ideal bagi sebuah negara. Hal ini dapat terjadi berkat pertukaran pikiran atau ide antara banyak orang, sehingga muncul berbagai sudut pandang baru yang relevan untuk diterapkan dalam kebijakan publik. Selain itu, hal yang tidak kalah penting dari kehadiran oposisi di Indonesia, menurut Cak Nur, ialah jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia [26]. Kehadiran oposisi di sebuah negara berarti memberi kesempatan bagi isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan hak-hak sipil lainnya dapat diangkat. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat menaruh perhatian lebih dalam upaya-upaya menghormati hak-hak asasi manusia.

Kritik kaum oposisi terhadap pemerintah serta upaya untuk menghadirkan alternatif kebijakan bagi pemerintah bertujuan untuk mencegah bahan otoritarianisme. Para pemegang tampuk pemerintah bisa masuk dalam jebakan otoritarianisme jika mereka tidak dikontrol. Keberadaan kaum oposisi sedapat mungkin mengimbangi tendensi otoritarian karena mereka mengingatkan pemerintah yang berkuasa untuk lebih demokratis dan mendengarkan suara mereka yang berada di luar kekuasaan.

Koalisi Gemuk Ala Jokowi sebagai Upaya Menghapus Oposisi

Koalisi gemuk yang dibangun oleh Jokowi bersama wakilnya menuai beragam komentar dari berbagai pihak. Ada kelompok yang mendukung keputusan Jokowi dengan pendapat bahwa upaya menggandeng seluruh parpol di parlemen adalah demi menjamin sekuritas politik. Menurut Jose Antonio Cheibub, menggabungkan antara sistem presidensialisme dengan multipartai adalah hal yang lumrah. Hubungan yang “mesra” antara eksekutif dengan legislatif di parlemen akan membuat *presidential majority* (dukungan mayoritas), sehingga presiden dapat lebih mulus membuat kebijakan politis tanpa menemui hambatan yang datang dari perbedaan kepentingan di ranah eksekutif maupun legislatif [27]. Hal ini juga menunjukkan bahwa relasi antara eksekutif dan legislatif diasumsikan jauh lebih harmonis karena suara mayoritas parpol di parlemen sejalan dengan suara pemerintah [28]. Dalam kondisi demikian, presiden akan menahkodai negara tanpa peran oposisi karena semua parpol di parlemen memihak padanya. Situasi seperti ini pernah dialami oleh presiden sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Demi menjamin sekuritas politik di tanah air, SBY rela mendesain koalisi dengan postur yang “gemuk” [29]. Tindakan inilah yang kiranya diadopsi oleh Jokowi. Demi membangun kekuatan politik di parlemen, Jokowi rela merangkul dua parpol yang selama ini telah menjadi rivalnya, yakni Partai Demokrat dan Gerindra [30].

Bergabungnya Prabowo Subianto ke dalam jajaran para menteri Jokowi menjadi pertanda bergabungnya Gerindra sebagai oposisi ke dalam koalisi pemerintah. Alasan Jokowi mengangkat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) ialah demi membangun koalisi gotong royong. Ia menambahkan

bahwa oposisi bukanlah bagian dari tradisi berdemokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia ialah demokrasi gotong royong [31]. Selain itu, Jokowi menilai bahwa Prabowo memiliki rekam jejak yang lengkap dalam bidang pertahanan, sehingga ia cocok mengembang tugas sebagai Menhan. Pada akhir masa jabatannya, Jokowi kembali membuat keputusan mengejutkan dengan mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Putra sulung SBY itu resmi bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju setelah dilantik oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 21 Februari 2024 yang lalu. Bergabungnya AHY bersama Partai Demokrat ke dalam koalisi pemerintah menjadi akhir dari perjalanan Partai Demokrat sebagai oposisi selama lebih dari sembilan tahun. Dengan demikian, bergabungnya kedua partai oposisi tadi membuat peran oposisi di Indonesia menjadi lemah.

Keputusan Jokowi untuk merangkul mayoritas parpol di parlemen ke dalam lingkungan kekuasaan membuat koalisinya menjadi gemuk. Gemuknya koalisi ala Jokowi ini tentu merusak citra demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, banyak pengamat politik, salah satunya Cak Nur, yang memberikan pandangan bahwa koalisi yang “gemuk” dapat menjadi ancaman bagi sistem presidensial. Hal ini karena tanpa oposisi, politik akan berjalan pincang, tidak ada keseimbangan, dan pengawasan, ditambah lagi pemerintahan yang tidak dikontrol oleh peran oposisi cenderung kehilangan arah [32].

Kritik Cak Nur terhadap Upaya Menghilangkan Oposisi di Indonesia

Salah satu sumbangan pemikiran Cak Nur adalah mengenai pentingnya peran oposisi di Indonesia. Cak Nur mengakui bahwa peran oposisi sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan pemerintah merupakan sebuah instrumen penting. Ia menolak pandangan yang menganggap oposisi bukanlah budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya Barat sehingga mesti dihilangkan dari corak politik di Indonesia. Oposisi sejak awal merupakan cerminan dari prinsip-prinsip kebebasan dalam berdemokrasi [33]. Hal itu berarti sikap menyepelekan peran oposisi hingga upaya menghilangkan oposisi adalah bentuk dari ketidakpahaman seseorang terkait prinsip-prinsip berdemokrasi [34].

Berangkat dari pandangan di atas, ada beberapa upaya untuk menghilangkan oposisi di Indonesia dan kritik terhadapnya berdasarkan pemahaman Cak Nur tentang oposisi. Pertama, oposisi berperan sebagai *check and balance* bagi pemerintah. Cak Nur selalu mengingatkan pentingnya oposisi sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan. Oposisi dibutuhkan agar dapat mengawasi kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah ke parlemen, agar keputusan presiden tidak cenderung mengakomodasi kepentingan parpol di koalisinya [35]. Sedangkan, perbedaan pendapat yang kadang kala dilontarkan oleh oposisi merupakan upaya penyeimbang kekuasaan, sehingga iklim demokrasi tetap stabil. Apabila oposisi dihilangkan, maka situasi ini menjadi ancaman serius bagi penyelenggaraan pemerintahan, sebab fungsi pengawasan dari parlemen menjadi lemah dan tidak objektif berkat relasi mesra presiden dan koalisinya. Ancaman inilah yang tidak disadari oleh Jokowi-Ma’aruf. Koalisi gemuk tidak sepenuhnya menjamin kestabilan pemerintahan, bahkan sebaliknya justru sangat membahayakan keberlanjutan demokrasi di Indonesia [36].

Kedua, oposisi mewakili kegelisahan rakyat. Salah satu argumen yang Cak Nur bangun berkaitan dengan peran oposisi bagi Indonesia ialah demi menyuarakan kegelisahan rakyat terhadap setiap keputusan pemerintah [37].

Dengan kata lain, oposisi mewakili perasaan kelompok warga masyarakat yang berhak menuntut konfirmasi dan pertanggungjawaban dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, upaya menghilangkan oposisi berarti upaya membungkam suara rakyat yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Upaya pembungkaman inilah yang sepertinya coba dilakukan oleh Jokowi dengan jalan menggemukkan koalisi mereka.

Ketiga, oposisi mencegah jebakan otoritarianisme. Koalisi yang gemuk menyebabkan parpol di parlemen dapat bersekutu dengan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa presiden menjadi episentrum kekuasaan eksekutif dan mengendalikan kekuatan suara para parpol di parlemen. Hal ini menyebabkan pemerintahan mudah jatuh ke dalam rezim otoritarianisme. Levitzky dan Ziblatt mengatakan bahwa absennya peran legislatif dalam mengawasi eksekutif menjadi gejala awal lahirnya pemimpin bangsa yang demagog [38]. Situasi ini diakibatkan oleh berpihaknya semua parpol di parlemen kepada pemerintah, sehingga tidak ada parpol yang dapat menjalankan peran sebagai oposisi yang mengawasi kebijakan pemerintah. Keadaan ini membuat demokrasi perlahan-lahan membusuk dan akhirnya negara berjalan mundur ke era otoritarianisme. Tidak mengherankan apabila di akhir masa pemerintahan SBY dan Jokowi, isu penambahan masa jabatan presiden mencuat [39].

Menimbang Pentingnya Oposisi dalam Pemerintah Sekarang

Joko Widodo sudah mengalihkan tumpuk pemerintahan sebagai presiden ke tangan Prabowo. Jokowi sendiri mendukung pencalonan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka (anak kandung Jokowi) hingga terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kini Prabowo dan Gibran sudah menjalankan roda pemerintahan. Partai-partai koalisi yang mengusung keduanya sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Partai yang kalah dalam pilpres memilih untuk berada di luar partai, meskipun tidak mau menyebut diri sebagai oposisi pemerintahan sekarang. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa PDIP tidak akan menjadi oposisi pemerintahan Prawobo-Gibran [40]. Partai Nasdem yang juga kalah dalam pilpres memilih sikap yang tidak jauh berbeda dari PDIP. Partai ini memutuskan untuk berada di luar kabinet bentukan Prabowo, namun bukan sebagai oposisi [41].

Sikap PDIP dan Nasdem di atas memunculkan pertanyaan mengapa keduanya tidak mau mengambil posisi sebagai oposisi? Jika tidak mau menjadi oposisi dalam pemerintahan sekarang, siapa yang akan menjalankan peran oposisi sebagai *check and balance*, mewakili kegelisahan rakyat dan mencegah pemerintah untuk jatuh ke dalam otoritarianisme? Kita tidak bisa memberikan atau menemukan jawaban yang instan untuk pertanyaan di atas karena Prabowo-Gibran baru menjalankan roda pemerintahan. PDIP dan Nasdem bisa saja mengubah haluan politik mereka dengan menjadi bagian dari pemerintahan sekarang atau pun tetap memilih berada di luar, meskipun bukan sebagai oposisi.

Jika partai politik seperti PDIP dan Nasdem memilih untuk tidak menjadi oposisi, peran oposisi bisa juga dimainkan oleh individu tertentu, organisasi masyarakat serta akademisi dan mahasiswa. Ketiadaan partai politik yang mengambil posisi dan peran sebagai oposisi tidak dengan sendirinya meniadakan oposisi. Menurut Firman Noor, dalam konteks demokrasi, oposisi berlaku secara universal dan dapat diterapkan dalam pemerintahan yang menganut sistem parlementer dan presidensial. Peran oposisi dalam konteks *check and balance* memang lebih nyata dalam sistem parlementer. Namun

oposisi juga bisa menjadi efektif dalam sistem presidensial dan menjalankan peran sebagai penyeimbang kekuasaan dan menjaga agar alternatif kebijakan dapat disuarakan [42].

Oposisi ini bisa berasal dari partai politik, juga dari berbagai elemen masyarakat. Tanpa kontrol dari oposisi, pemerintah yang berkuasa bisa lepas kontrol dan mengambil kebijakan yang salah. Pada masa pemerintahan Jokowi, pihak eksekutif mendapat dukungan dari partai-partai mayoritas di parlemen sehingga membentuk pola-pola oligarki serta melemahkan posisi oposisi. Fungsi *check and balance* yang tidak jalan ini pada akhirnya melemahkan demokrasi di Indonesia [43]. Kooptasi eksekutif ke lembaga yudikatif pun membahayakan demokrasi. Contohnya adalah pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto dan Pengangkatan Guntur Hamzah oleh DPR lalu disahkan oleh Presiden. Hal ini, menurut Sumodiningrat dan Rahma (2024), merupakan preseden buruk yang mengancam demokrasi serta independensi peradilan [44]. Hal serupa juga terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Fariz (2019), pada masa pemerintahan Jokowi, KPK mengalami serangan politik seperti polemik pemilihan calon Kapolri, penggunaan hak angket oleh DPR hingga revisi UU KPK dan kurangnya dukungan politik dari Presiden Jokowi terhadap KPK membuat lembaga tersebut berada dalam kondisi darurat dan berdampak pada kinerja KPK dalam memberantas korupsi [45].

Mempertimbangkan beberapa fakta di atas, peran, kedudukan dan fungsi oposisi tetap menjadi niscaya dalam sebuah negara demokrasi. Cak Nur sudah mengemukakan tiga peran penting oposisi dalam sebuah negara demokrasi, yakni sebagai entitas yang menjalankan *check and balance* bagi pemerintah, mewakili kegelisahan rakyat serta mencegah jebakan otoritarianisme. Ketiga peran oposisi ini dapat sejalan dengan ideal atau visi Cak Nur tentang demokrasi dan terbentuknya masyarakat madani (*civil society*) yang beradab dan mandiri yang bermuara pada pembentukan identitas kebangsaan Indonesia. Peran yang dijalankan oposisi di atas menjadikannya sebagai pengawal pemerintahan. Ia loyal pada pemerintah tetapi juga kritis demi membangun demokrasi yang sehat. Mereka menjadi *opinion maker* untuk membantu pemerintah. Dengan itu, oposisi memainkan peran penting dalam kehidupan berdemokrasi dan demokratisasi itu sendiri [46]. Oposisi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat madani (*civil society*). Cak Nur mengidealkan masyarakat madani yang egaliter dan terbuka, menghargai pluralisme dan toleransi, mengedepankan prinsip musyawarah serta keadilan sosial. Semua hal ini terbentuk melalui satu proses demokrasi karena demokrasi merupakan rumah yang ideal bagi masyarakat madani [47]. Dinamika yang dibangun oposisi dalam relasinya dengan pemerintah yang berkuasa serta pembangunan masyarakat madani pada akhirnya bermuara pada pembentukan identitas keindonesiaan kita sebagai sebuah bangsa [48]. Keindonesiaan kita bertolak dari keberagaman dan perbedaan. Koalisi dan oposisi pada prinsipnya berbeda orientasi politik. Namun keduanya harus bersinergi ketika berada dalam satu wadah bernama Indonesia.

Prabowo dan Gibran bersama kabinet Merah Putih tengah menjalankan roda pemerintahan. Meskipun partai yang kalah dalam pilpres tidak menyatakan diri sebagai oposisi, mereka tentu menjalankan fungsi *check and balance*, penyambung aspirasi masyarakat serta pengontrol pemerintah agar tidak jatuh dalam otoritarianisme sebagaimana ditekankan Cak Nur. Peran yang sama tentu juga dijalankan oleh berbagai elemen masyarakat. Karena itu, agar Prabowo dan Gibran tidak terjebak dalam upaya meniadakan oposisi seperti yang dilakukan

oleh pendahulunya, menerima dan mendengarkan oposisi adalah sebuah keharusan. Meskipun oposisi selalu mengumandangkan suara kritis, dia adalah mitra yang loyal pada pemerintah dan lebih dari itu loyal pada Indonesia. Membungkam oposisi dan menyingkirkan suara-suara kritis adalah langkah mundur dalam membentuk keindonesiaan seperti yang dicita-citakan Cak Nur.

D. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, ada beberapa kesimpulan tentang pandangan Cak Nur mengenai pentingnya oposisi dalam demokrasi. Pertama, peran oposisi sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan tidak dapat tergantikan oleh pihak-pihak lain. Oleh sebab itu, keberadaan oposisi sangat penting bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Dengan demikian, pilihannya hanya dua, tetap mempertahankan keberadaan oposisi demi terhindar dari ancaman kekuasaan buta oleh pemerintah, atau menghapus oposisi dengan konsekuensi negara akan berjalan sesuai keinginan penguasa tanpa dapat dikontrol oleh masyarakat. Kedua, kegelisahan dan kecemasan masyarakat akan dijamin bila oposisi tetap ada. Hal ini berarti ketika masyarakat kurang puas terhadap kebijakan publik pemerintah, maka oposisi dapat berperan sebagai penyambung lidah masyarakat. Hal ini hanya dimungkinkan selagi oposisi masih tetap ada dalam sebuah pemerintahan, sebaliknya bila oposisi dihapus, maka artinya suara protes dari masyarakat akan dibungkam. Ketiga, selagi oposisi masih ada dalam sebuah pemerintahan, maka negara tidak akan jatuh ke dalam tirani kekuasaan. Oposisi akan sangat berperan penting dalam mengawasi setiap kebijakan presiden yang didiskusikan di dalam parlemen. Bila oposisi tidak ada, maka pemerintah dapat dengan mudah mengakomodasi kepentingan parpol di parlemen, tanpa memperhitungkan kepentingan rakyat.

Oposisi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari negara demokrasi seperti Indonesia. Upaya menghapus keberadaan atau menyepelekan peran oposisi adalah sebuah tindakan yang merusak citra luhur demokrasi seperti yang ditekankan Cak Nur. Iklim demokrasi yang diidealkan Cak Nur adalah demokrasi yang menyatukan yang berada dalam kekuasaan (koalisi dan pemerintah) dengan pihak yang berada di luar lingkaran kekuasaan (oposisi). Keduanya bersinergi untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan demi membangun Indonesia yang lestari. Lebih jauh dari itu, kehadiran oposisi turut membentuk jati diri bangsa Indonesia menjadi masyarakat madani yang egaliter, menghargai perbedaan pluralisme dan toleransi serta mengutamakan musyawarah. Inilah sumbangan pemikiran Cak Nur yang tetap relevan dengan kehidupan politik Indonesia saat ini dan nanti hingga tetap memperkokoh jati diri bangsa Indonesia. Hal ini sekaligus juga mesti menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam mengembangkan mandatnya demi membangun keindonesiaan yang sejati.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Noor, Firman. 2016. Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Masyarakat Indonesia* 42(1), 1-17.
- [2] Toyibi, Vicko Wahyo Rifan. 2024. Peran dan Keterlibatan Partai Politik Oposisi dalam Mengawal Demokrasi: Pendekatan “Checks and Balances” dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Journal of Social and Economics Research* 6(2), 539-549.

- [3] Lafuil, Abdul Kadir dan Umar, Kusnadi. 2022. Kedudukan Partai Oposisi terhadap Keberlangsungan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Al Tasyri'iyyah* 2(2), 96-107.
- [4] Indonesia, B. N. 2019. "Jokowi Angkat Prabowo Jadi Menhan: Dari Musuh ke Koalisi, Langkah yang Menjadi 'Hari Gelap' HAM dan 'Turunkan' Nilai Demokrasi," *BBC News Indonesia* 23 Oktober 2019, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50136052>.
- [5] Madjid, N. 1999. *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.
- [6] Effendy, B. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- [7] Akhbar, A., Miranda, A., Fahrezi, A.N., & Jannah, M. 2020. Analisis Dampak Sistem Multipartai dalam Implementasi Sistem Presidensil di Era Jokowi & Jusuf Kalla. *The Journalish: Social and Government*, 1(1), 28-32.
- [8] Efriza. 2022. Analisis Kemunduran Demokrasi Pada Pengelolaan Satu Setengah Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. *Journal of Government and Social Issues* 2(11), 109-131.
- [9] Hakim, M. A. L., Darmawan, C., & Anggraeni, L. 2019. Demokrasi Minim Oposisi: Narasi Maha Puitis Sejarah Atas Reduksi Oposisi. *Jurnal Education and Development* 10(3), 647–683.
- [10] Benny, Georgius dan Maharani, Anindya Putri. 2024. Implikasi Sistem Multipartai terhadap Oposisi di Indonesia: Analisis Hasil Pemilu 2024 dengan Indeks ENPP. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5(2), 1014–1030.
- [11] Muhammedi. 2017. Pemikiran Sosial dan Keislaman Nurcholish Madjid (Cak Nur). *Jurnal Tarbiyah* 24(2), 351–370.
- [12] Kumparan. 2021. "Profil Nurcholish Madjid atau Cak Nur yang Lahir 17 Maret 1939." *Kumparan.com* 17 Maret 2021, dalam <https://kumparan.com/berita-hari-ini/profil-nurcholish-madjid-atau-cak-nur-yang-lahir-17-maret-1939-1vN3GHC53nK>.
- [13] Madjid, N. 1994. *Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- [14] Rahman, M. T., & Mimbar, A. S. 2018. Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Madjid. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 3(2), 385-400.
- [15] Madjid, N. 1994. *Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- [16] Gaus AF, Ahmad. 2010. *Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- [17] Madjid, N. 1998. *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.
- [18] Shobawah, N. 2016. Harmonisasi Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kebijakan Pemerintah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 363–392.
- [19] Munawar, M. 2020. Relevansi dan Implementasi Pemikiran Nurcholish Madjid terhadap Politik Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22(2), 325–349.
- [20] Rahman, M. T., & Mimbar, A. S. 2018. Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Madjid. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 3(2), 385-400.

- [21] Liyanto, David Cristian. 2024. Kedudukan Partai Oposisi dalam Mewujudkan “Check and Balance” di Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum* 7(2): 131-142.
- [22] Madung, Otto Gusti. 2022. “Demokrasi dan Kebenaran,” dalam *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*, Wijayanto, A. P. Budiarti, H. P. Wiratman. (ed.). Jakarta: LP3ES, hlm. 888-901.
- [23] Munawar, M. 2020. Relevansi dan Implementasi Pemikiran Nurcholish Madjid terhadap Politik Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22(2), 325–349.
- [24] Madjid, N. 2004. *Indonesia Kita*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- [25] Aziz, A. A. 1999. *Neo-Modernisme Islam di Indonesia: Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [26] Monib, M., & Bahrawi, I. 2011. *Islam & Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [27] Cheibub, J. A. 2007. *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*. New York: Cambridge University Press.
- [28] Indrayana, D. 2008. *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas.
- [29] Rishan, I. 2019. “Koalisi-Oposisi.” *Fakultas Hukum UII*, 9 Juli 2019, dalam <https://law.uii.ac.id/blog/2019/07/09/koalisi-dan-oposisi-oleh-dr-idul-rishan-s-h-ll-m/>.
- [30] Rishan, I. 2019. “Amandemen Konstitusi dan Koalisi Partai.” *Tempo.co* 13 Agustus 2019, dalam <https://www.tempo.co/kolom/amendemen-konstitusi-dan-koalisi-partai-717919>.
- [31] Ihsanuddin dan Krisiandi. 2019. “Presiden Jokowi Ungkap Alasan Pilih Prabowo Sebagai Menhan.” *Kompas.com* 24 Oktober 2019, dalam https://nasional.kompas.com/read/2019/10/24/18482151/presiden-jokowi-ungkap-alasan-pilih-prabowo-sebagai-menhan#google_vignette.
- [32] Susanto, M. 2012. Pelembagaan Oposisi dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia. *Academia* 4(1), 87–100.
- [33] Rahman, M. T., & Mimbar, A. S. 2018. Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Madjid. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 3(2), 385-400.
- [34] Pratama, M. I., Chalid, A., & Kurniati, K. 2024. Doktrin Etika Politik Terhadap Lembaga Negara di Indonesia Menurut Pandangan Nurcholish Majid. *Jurnal Ilmiah Pranata Edu* 6(1), 1-15.
- [35] Agustiawan, M. N. 2017. Pengaruh Multipartai dalam Sistem Presidensil di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 4(1): 49–61.
- [36] Rishan, I. 2020. Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27(2), 219–240.
- [37] Benartin, B. P., & Yudoprakoso, P. W. 2022. Pengaruh Ambang Batas Parlemen terhadap Kedudukan Partai Oposisi serta Kaitannya dengan Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia. *Gloria Justitia* 1(2), 176–191.
- [38] Levitsky, S., & Ziblatt, D. 2019. *Bagaimana Demokrasi Mati*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [39] Rishan, I. 2020. Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27(2), 219–240.

- [40] Azhari, Muhammad Rafi. 2025. "PDIP Tegaskan Tak Akan Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo Subianto." *Tempo.co*, 11 Januari 2025, dalam https://www.tempo.co/politik/pdip-tegaskan-tak-akan-jadi-oposisi-pemerintahan-prabowo-subianto-1192587#goog_rewared.
- [41] Rahmawati, Dwi. (2024). "NasDem Putuskan di Luar Kabinet Prabowo, tapi Bukan Oposisi." *Detikbali*, 14 Oktober 2024, dalam <https://www.detik.com/bali/berita/d-7587114/nasdем-putuskan-di-luar-kabinet-prabowo-tapi-bukan-oposisi>.
- [42] Noor, Firman. (2016). Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Masyarakat Indonesia* 42(1): 1-17.
- [43] Beso, Antonius Jeremias dan Rahmawati, Restu. 2021. Hubungan Eksekutif dan Legislatif pada Era Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta* 6(2), 89-112.
- [44] Sumodiningrat, Aprilian dan Rahma, Nabila Aulia. 2024. Penggantian Non-Prosedural Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Demokrasi dan Independensi Peradilan. *Jurnal Konstitusi* 24(4), 589-608.
- [45] Fariz, Donal. 2019. Pemerintahan Jokowi dan Serangan Politik terhadap KPK. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 5(2), 19-33.
- [46] Hidayatulloh, Taufik dan Muna, Izzu. 2024. Corak Pemikiran Nurcholish Madjid dalam Bingkai Politik Kebangsaan di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia* 7(3), 551-561.
- [47] Fazillah, Nur. 2017. Konsep Civil Society Nurcholish Madjid dan Relevansinya dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer. *Al-Lubb* 2(1), 206-225.
- [48] Madjid, N. 2019. "Menemukan Indonesia," dalam *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, Budhy Munawar-Rahman (Penyunt.). Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society, hlm. 1281-1283.